

DIPLOMASI INDONESIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN PAPUA

¹Hanifah Prasetyo, ²M. Syaprin Zahidi

^{1,2} Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: hanifahprasetyo@webmail.um.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to explain Indonesia's efforts to defend the Papua region through soft power diplomacy. As we know, Papua has abundant mining potential. Coupled with the variety of flora and fauna there, it adds value to the Papua region. However, with all this potential, the Papuan people are even disappointed by the treatment of the Indonesian government. With the development process being uneven, the rampant cases of unresolved human rights violations, and the government's failure to accommodate the aspirations of its people, this has increasingly encouraged the people of Papua to secede from Indonesia. The author uses descriptive research methods and data sourced from previous journals and official government websites. The data that has been collected is then analyzed until a conclusion can be drawn. The author finds that, from an external perspective, Indonesia uses economic diplomacy, cultural diplomacy, and defense diplomacy while still adhering to "Indonesia's Look East Policy". This is done with the aim of maintaining Indonesia's national interests regarding its territory and also to maintain good relations between countries in the South Pacific region.

Keywords: Diplomacy, Human Rights, AIDS, Melanesian, Policy

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Indonesia dalam mempertahankan wilayah Papua melalui jalur soft power diplomasi. Seperti yang kita tahu bahwasannya Papua memiliki potensi hasil tambang yang melimpah. Ditambah lagi dengan beragamnya flora dan fauna disana semakin menambah value wilayah Papua. Namun, dengan semua potensi ini, masyarakat Papua malah dibuat kecewa dengan perlakuan pemerintah Indonesia. Dengan tidak meratanya proses pembangunan, maraknya kasus pelanggaran HAM yang tak tuntas, dan gagalnya pemerintah dalam menampung aspirasi rakyatnya semakin mendorong masyarakat Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan data bersumber dari jurnal-jurnal terdahulu dan laman resmi pemerintah. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis hingga dapat ditarik kesimpulan. Penulis menemukan bahwasannya dari aspek eksternal, Indonesia menggunakan jalur diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, dan diplomasi pertahanan dengan tetap berpatokan pada kebijakan "Indonesia's Look East Policy". Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan nasional Indonesia terkait wilayahnya dan juga untuk menjaga hubungan baik antar negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Kata Kunci: Diplomasi, Hak Asasi Manusia, AIDS, Melanesian, Policy

PENDAHULUAN

Secara teoritis, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan merupakan suatu anugerah dari tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi (Triwahyuningsih, 2018). Tanpa adanya HAM kehidupan bermasyarakat akan terganggu dengan banyaknya penindasan, kerusuhan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Topik ini menarik dan penting untuk dibahas karena permasalahan HAM di Papua ini terjadi sudah cukup lama dan seperti tak akan ada ujung penyelesaian masalahnya. Di Indonesia sendiri sudah banyak kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk menegakkan dan melindungi hal-hal yang harus diperoleh oleh setiap individu. Upaya-upaya untuk membuat masyarakat sadar akan Hak Asasi juga terus menerus digaungkan. Dalam perkembangannya, jaminan dan perlindungan HAM di Indonesia tidak sebanding dengan kondisi yang diharapkan, bahkan tidak sejalan dengan misi dan tujuan filosofis Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai, Indonesia kemudian dipertanyakan keseriusannya dalam menyelesaikan kasus ini. Bahkan kasus pelanggaran HAM di Papua sampai disuarakan dalam forum *side event* di Genewa, Swiss oleh Dewan HAM PBB (Jayapura, 2022). Pada forum tersebut, perwakilan dari Papua menyampaikan situasi HAM masa lalu (marginalisasi) dan masa kini (pembunuhan hingga masalah pengungsian) serta masalah pembangunan di Papua. Selain dianggap tidak serius dalam penyelesaian kasus ini, Indonesia juga dianggap mengabaikan hak-hak ekonomi, politik, dan sosial masyarakat Papua. Hal ini diperparah dengan tidak terungkapnya pelaku dari sekian

banyaknya aksi pelanggaran HAM disana yang mengakibatkan banyak negara yang mendukung tindakan separatistis ini.

Sadar akan keinginannya untuk berpisah, Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara otomatis membutuhkan dukungan dari negara lain terutama kawasan pasifik Selatan. Sebagai langkah awal, mereka mengajukan keanggotaan *Melanesia Spearhead Group* (MSG) pada Juni 2013. Pengajuan ini dilakukan oleh anggota gabungan dibawah naungan OPM yaitu Koalisi Nasional Pembebasan Papua Barat. pengajuan ini kemudian diterima pada Juli 2015 setelah dibentuknya *United Liberation Movement for West Papua* sebagai syarat untuk bergabung dalam MSG. Hal ini kemudian menyebabkan banyak dukungan dari banyak negara terutama negara-negara dengan ras Melanesia. Dukungan ini dilihat dari sikap pemimpin dan masyarakat sipil dari banyak negara yang tergabung dalam MSG, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru (Zahidi – MA, 2018). Solidaritas pada etnis Melanesia mendorong masyarakat Melanesia pada satu tujuan utama mereka, yaitu membebaskan kelompok rasnya dari penjajahan (*Melanesian Way*). Karena ini lah Vanuatu ikut membela kemerdekaan Papua dalam sidang PBB dan mengkritik Indonesia terkait penanganan isu HAM Papua. Selain itu, Vanuatu yang ingin menjadi *leading actor* dalam forum tersebut membuat Vanuatu semakin vokal untuk terus mengangkat isu ini ke ranah internasional (Zahidi, 2020). Pada forum internasional, banyak negara-negara Pasifik Selatan memberikan dukungannya dengan menuduh dan menyudutkan pemerintah Indonesia terkait pelanggaran HAM, rasisme, bahkan genosida. Hal ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat internasional dan

mendesak PBB untuk mengambil alih penanganan kasus ini (Rahmadani, 2022).

Dari sisi pemerintah pun tak tinggal diam. Banyak upaya yang telah dilakukan dari tiap-tiap rezim pemerintahan di Indonesia baik secara eksternal maupun internal. Hal ini dapat dilihat pada rezim Gusdur yang menggunakan pendekatan dialog, rezim Habibie dengan pendekatan akomodatifnya, rezim SBY dengan meningkatkan pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pada akhir masa pemerintahannya, dan Jokowi dengan mengedepankan pendekatan dialog dan meningkatkan pembangunan infrastruktur disana. Dengan menggunakan soft power diplomasi, Jokowi secara perlahan memperbaiki citra Indonesia yang terlanjur buruk terkait isu HAM di wilayah Pasifik Selatan dengan memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara di kawasan itu (Rahmadani, 2022). Selain itu, Papua merupakan wilayah dengan segudang potensi alamnya dapat menimbulkan niat negara lain untuk mendapatkannya. Intervensi yang dilakukan oleh *state actor* maupun *non state actor* ini kemudian akan dapat memperkeruh suasana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari jurnal ilmiah yang bersumber dari *Google Scholar* dan laman resmi pemerintah yang kemudian dijadikan acuan dalam menulis artikel ini. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, analisis yang dihasilkan kemudian dapat menjabarkan topik yang berkaitan dengan perspektif topik pada jurnal terdahulu. Penulis juga menggunakan aplikasi *Harzing: Publish or Perish 8* untuk mempermudah penulis dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa dimana data tersebut

ditelaah dan dipilah berdasarkan kebutuhan penelitian hingga dapat ditarik kesimpulan dan dikembangkan lagi. Penggunaan aplikasi mendeley sendiri berguna untuk mencantumkan nama peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan negara-negara wilayah Pasifik Selatan. Walaupun banyak sekali dinamika yang dihadapi, tetapi pemerintah Indonesia tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan tersebut. Karena isu ini terus diangkat dalam ranah internasional, Indonesiapun mengambil langkah *defensive* dengan membantah tuduhan dan pernyataan yang dilontarkan dan mencoba meluruskan informasi, menanamkan pesan strategis hingga membangun hubungan melalui kerjasama pada beberapa bidang (Sahanda, 2020). Hubungan dengan negara-negara di pasifik menjadi penting, karena jika diabaikan maka Indonesia semakin berpotensi untuk kehilangan teritorinya.

Untuk menanggapi kasus pelanggaran HAM di Papua, ancaman yang datang dari dukungan negara-negara Pasifik terhadap kemerdekaan Papua kemudian mengantarkan Indonesia untuk membuat kebijakan "*Look East Policy*" sebagai bentuk dari upaya pertahanan teritorinya dan juga untuk menjaga hubungan dengan negara-negara Kawasan Pasifik Selatan (Hasanah, 2021). *Look East Policy* merupakan langkah kebijakan Indonesia dengan wilayah Pasifik Selatan dalam bentuk meningkatkan bantuan ke negara-negara Pasifik Selatan. Kebijakan ini memprioritaskan kawasan Pasifik Selatan sebagai mitra kerja sama pembangunan baik secara bilateral, trilateral, maupun multilateral (Rahmadani, 2022). Bentuk diplomasinya berupa kerja sama ekonomi, pemberian

bantuan dalam aspek kemanusiaan, dan menjadikan budaya sebagai instrumentnya.

Eksternal

Diplomasi Ekonomi

Dengan kondisi negara yang hanya mengandalkan bantuan luar negeri, Indonesia kemudian mengambil langkah diplomasi baik unilateral maupun multilateral berupa penyaluran bantuan luar negeri kepada negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Diresmikannya “*Indonesian AID*” pada 2019 silam bertujuan untuk menguatkan kerja sama pembangunan internasional, kerjasama selatan-selatan dan triangular, pencapaian SDG’s serta kontribusi dalam menjaga perdamaian dan kesejahteraan social. Ditahun yang sama tepatnya pada bulan Maret, Indonesia mengadakan *Indonesia South Pacific Forum* (ISPF) guna meningkatkan hubungan kerja sama ekonomi di bidang perdagangan, investasi, kerja sama teknis dan meningkatkan kapasitas diantara negara-negara Kawasan Pasifik Selatan (Rahmadani, 2022). Selain itu, Kementerian Bidang Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Dana ini dipergunakan untuk pengupayaan peningkatan citra Papua, kerja sama Indonesia – Pasifik Selatan, pengelolaan kerja sama keamanan perbatasan, dan lain sebagainya (Finaka et al., n.d.).

Dalam laman Kementerian Luar Negeri Indonesia (2022), pemerintah Indonesia mengadakan *Indonesia Pacific Forum for Development* (IPFD) pada 7 Desember 2022 lalu mendapat respon positif dari para peserta forum. Mereka menyambut baik komitmen Indonesia terhadap pembangunan di kawasan pasifik terutama dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi. IPFD juga memasukkan *Pacific Business Engagement* dengan mengahdirkan Menteri Luar Negeri

Papua Nugini dan Timor Leste serta tiga lokakarya dengan mengusung topic pengurangan resiko bencana: peningkatan kapasiitas baagi UMKM dan pemberdayaan perempuan.

Dalam aspek kemanusiaan, Indonesia telah menandatangani perjanjian Hibah untuk Pemerintah Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan Fiji pada 16 Desember 2022 lalu sebagai upaya penanganan pandemic. Selain itu, perjanjian ini juga akan digunakan untuk pembangunan Queen Victoria School (QVS) tahap II (tahap I pada 2019 silam) yang rusak akibat bencana angin topan Winston. Pendanaan bantuan ini berasal dari *Indonesia AID* (Cindyara, 2020).

Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya berada pada spectrum ideal dalam melakukan diplomasi. Hal ini dikarenakan pada spectrum ini, seseorang dapat melakukan soft power berupa branding, propaganda, dan diplomasi public. Gagasan klasik tentang diplomasi budaya sebagian besar terbatas pada promosi budaya di suatu negara dengan tujuan memperkuat hubungannya dengan negara lain, meningkatkan kerja sama, dan juga untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya. Seiring perkembangan jaman, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kemudian memfasilitasi pergeseran ataupun pertukaran budaya yang terjadi dalam lingkup masyarakat ke lingkup privat (Bernadette, 2022)..

Pada era rezim Joko Widodo, Indonesia memiliki 4 prioritas dalam melakukan kebijakan luar negerinya, salah satunya adalah memperluas keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan *Look East Policy* menekankan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan berbagai inisiatif regionalisasi seperti MSG, *Pacific Island Forum* (PIF), dan

Pacific Island Development Forum (PIDF) (Bernadette, 2022). Diplomasi Indonesia secara langsung melakukan pendekatan kebudayaan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga harus memaksimalkan pengaruh Selandia Baru sebagai negara besar di Kawasan Pasifik Selatan. Selandia Baru sendiri berpengaruh bagi Indonesia dalam has menjembatani perbedaan pendapat antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan terkait masalah separatism yang dilakukan Papua.

Dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatic Indonesia dengan Selandia Baru, KBRI di Wellington mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar public, pameran foto, panggung seni, dan sebagainya pada 2018 lalu. Acara ini kemudian ditutup dengan sebuah konser music dengan mengusung tema “*The Symphoni of Friendship*”. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada hal layak umum bahwa Indonesia juag memiliki kemiripan budaya dengan masyarakat di kawasan pasifik Selatan yang seharusnya tidak menjadikan Indonesia sebagai masyarakat yang asing (Bernadette, 2022).

Selain itu, ada banyak program kerja sama dalam aspek kebudayaan yang dilakukan Indonesia dan negara-negara pasifik seperti Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Pada 27-29 Oktober 2015, pemerintah Indonesia mengadakan Festival Budaya Melanesia di Kupang, NTT dengan tujuan mengenalkan dan melestarikan budaya Melanesia kepada generasi muda serta memicu adanya interaksi budaya dari masing-masing negara yang terlibat. *Bali Democracy Forum* juga merupakan langkah inisiasi Indonesia guna memperbaiki citra Indonesia. Forum ini merupakan sebuah forum *sharing experience* bagi negara-negara yang sedang mengembangkan sistem demokrasi dengan

beranggotakan baanyak negara terutama negara-negara Pasifik Selatan. *Journalist Visit Programme* (JVP) juga diselenggarakan pada tahun 2019. Program ini merupakan program kunjungan jurnalis mancanegara dengan topic bahasan yaitu mengenai infrastruktur, pembangunan, industry kreatif, dan sebagainya. Melalui program ini, diharapkan mereka akan mempublikasikaan hal-hal positif dari acara ini(Rahmadani, 2022).

Diplomasi Pertahanan

Pelaksanaan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh TNI AL di kawasan Pasifik Selatan merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan *Look East Policy*. Bentuk diplomasi yang dilakukan berupa pertemuan pejabat tinggi TNI AL, *Navy to Navy Talks* (NTNT), *information sharing*, pendidikan operasi dan latihan, kunjungan kapal perang (*port visit*) ke negara-negara Pasifik Selatan diplomasi ini dapat menunjukkan niat baik Indonesia dalam menjalin hubungan baik dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan dengan membawa misi damai. Disisi lain, melalui kegiatan ini pula Indonesia dapat menunjukkan kekuatan yang dimilikinya sehingga dapat memberikan efek deterance kepada negara yang dikunjungi. Selain itu, kegiatan ini memberikan isyarat pada negara-negara di kawasan itu bahwasannya Indonesia mampu hadir di lingkup kawasan tersebut(Kurniawan et al., 2022).

Internal

Tak hanya berfokus pada lingkup internasional saja, pemerintah juga mengupayakan dan meyakinkan Papua untuk tetap tergabung dalam NKRI. Sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan, tetapi banyak solusi yang diberikan dari pemeritah yang kurang tepat, tidak berjalan dengan baik, dan masih banyak kendala lainnya.

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan pendekatan represi dengan menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sambil memperbaharui kebijakan penaklukan dan menjarah sebagaimana watak negara feodal yang sentralistis ala kolonial Hindia Belanda. Kemudian ada masa reformasi, pemerintah mulai berubah dengan menggunakan pendekatan yang lebih humanis sesuai dengan semangat reformasi sebagaimana prinsip dasar HAM dan kebebasan berpendapat dijunjung tinggi di mana salah satunya merubah paradigma militer negara menjadi tentara profesional dan supremasi sipil dengan slogan “bersama rakyat, TNI kuat” (Nugroho, 2019: 3).

Setelah runtuhnya masa orde baru pemerintah kemudian menggunakan pendekatan akomodatif untuk meredam pertentangan yang terjadi. Lalu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong sebagai bentuk langkah Presiden Habibie dalam menjawab keinginan elite Papua untuk merdeka dari Indonesia (Nugroho, 2019: 4-5).

Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur), beliau secara gamblang meminta maaf atas pelanggaran HAM oleh militer terhadap masyarakat Papua yang telah terjadi di masa lalu dan menyetujui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Beliau juga mengangkat Gubernur Irian Jaya, Freddy Numberi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk pertama kalinya pada pemerintahan beliau digunakannya pendekatan model dialog di mana menurutnya pembangunan bukan hanya pada pembangunan fisik dan infrastruktur melainkan juga pembangunan manusia atau masyarakatnya. Pendekatan ini digambarkan

dengan adanya usaha untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat bukan hanya melalui konsep pendekatan keamanan dan keadilan berbentuk operasi militer untuk menjaga kesatuan dengan mengorbankan demokrasinya. Beliau juga menuturkan bahwa perdamaian tanpa keadilan hanyalah wacana semata maka ia berharap akan adanya jalur penyelesaian konflik dalam bentuk dialog yang tidak saling menyakiti antar pihak (Indonesia dan Papua).

Lalu mulai dari masa pemerintahan Megawati hingga SBY beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan konflik Papua secara dialog. Namun, pada akhir masa kepemimpinan SBY pendekatan tersebut tak kunjung dilakukan bahkan SBY mengeluarkan Perpres No. 65/2011 mengenai Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai langkah untuk menyelesaikan konflik secara tidak langsung melalui pembangunan seperti yang sudah dilakukan di masa sebelumnya. Padahal opsi pembangunan dialog ini dianggap paling efektif dalam meredam konflik.

Pada masa pemerintahan Jokowi mulai muncul harapan bagi rakyat Papua lantaran berdasarkan janji politiknya, beliau ingin berdialog dengan rakyat Papua termasuk mereka yang ingin merdeka sebagai langkah penyelesaian konflik. Beliau lebih mengedepankan kepada pendekatan dialog dengan meningkatkan martabat rakyat Papua ketimbang lebih mengedepankan pendekatan keamanan dan ekonomi seperti pemerintah sebelumnya dalam menangani masalah ini. Dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan manusia diharapkan memicu semangat baru bagi rakyat Papua untuk lepas dari kondisi keterpurukan dan kesenjangan yang selama ini mereka dapatkan. Dalam strategi pembangunan pun Jokowi menggunakan

tindakan yang masih bersahabat dengan HAM. Disatu sisi, Jokowi memang mendapat apresiasi ataupun dukungan terhadap upayanya membangun wilayah Papua. Namun, disisi lain beliau terlihat seperti kurang memprioritaskan penuntasan kasus pelanggaran HAM di Papua yang terbukti setelah penunjukkan *person in charge* pada 15 Agustus 2015 untuk mewujudkan upaya dialog yang kemudian tidak ada kabar untuk dilanjutkannya upaya tersebut. Hal ini kemudian memunculkan asumsi bahwa dengan berjalannya Negara secara soliter terkesan bahwa para pejabat-pejabat negara tidak mendukung atas gagasan ini.

Dengan pendekatan-pendekatan yang sudah diterapkan, tetapi masih saja ada kelompok-kelompok yang tak puas hingga membuat mereka menempuh jalur separatis. Pemerintah pada masa pasca orde baru telah mengurangi represi atas wilayah Papua, tetapi tak menjawab apa yang dituntut oleh rakyat Papua. Hal ini didukung oleh pengeluaran kebijakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kemudian kelompok-kelompok yang tak puas tersebut secara pasif melakukan teror berupa ofensif bersenjata dan resistensi terhadap pemerintah pusat.

Upaya otonomi khusus dianggap gagal meskipun Papua telah memperoleh status khusus pada 1999 tetapi aksi pemberontakan makin menjadi. Sama halnya dengan telah direvisinya UU pada 2001 tetapi pemerintahan tak berjalan normal bahkan hingga disfungsi. Masalah ini di titik beratkan kepada pola pemerintahan yang menggunakan instrumental kebijakan dan pembangunan untuk penyelesaian konflik sejalan dengan membangun operasi militer di sana. Padahal upaya-upaya seperti pemberian keistimewaan dan Otsus yang dilakukan bersama dengan operasi militer sampai

sekarang belum tercatat adanya kesuksesan dalam sejarah politik di Indonesia. Herannya disaat pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan penyejahteraan di Papua sambil menjalankan upaya dialog, timbul lah kecemburuan akibat tidak diperhatikannya wilayah lain seperti pemerintah memperhatikan Papua.

SIMPULAN

Adukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk gerakan separatis Papua berdampak pada munculnya ancaman baru bagi Indonesia. Upaya pertahanan Indonesia melalui 2 aspek, yakni eksternal dan internal. pada bagian eksternal, pemerintah Indonesia menggunakan jalur diplomasi ekonomi, budaya, dan pertahanan dari TNI AL. Diplomasi ini berupa pemberian bantuan luar negeri kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, latihan militer bersama, dan acara ragam budaya. Upaya ini dilakukan demi memperbaiki citra Indonesia yang terlanjur buruk di kancan internasional. Pada aspek internal, pemerintah mengusahakan wilayah Papua untuk tetap tergabung dalam NKRI dengan cara memberikan program pembangunan wilayah pemberian otonomi khusus, dan program penyejahteraan rakyat Papua. Beragam upaya yang dilakukan pemerintah mulai dari rezim orde baru hingga sekarang.

Upaya dalam aspek eksternal berpedoman pada kebijakan "Look East Policy". Kebijakan ini merupakan bentuk dari upaya menjalin dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara Pasifik Selatan. Diplomasi soft power menjadi penting untuk dilakukan karena jika menggunakan hard power malah akan memperumit situasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernadette, S. (2022). *Music Matters : Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Negara di Kawasan Pasifik Melalui ' the Symphony of Friendship ' di Selandia Baru*. 7(2), 205–226.
- Cindyara, A. (2020). *Indonesia tandatangani perjanjian hibah untuk Solomon dan Fiji*.
<https://www.antaraneews.com/berita/1898092/indonesia-tandatangani-perjanjian-hibah-untuk-solomon-dan-fiji>
- Finaka, A. W., Anggraini, A. D., & Paolo, B. (n.d.). *Bantuan Indonesia untuk Negara Pasifik Selatan*.
<https://indonesiabaik.id/infografis/bantuan-indonesia-untuk-negara-pasifik-selatan>
- Hasanah, I. U. (2021). *Look East Policy: Upaya Reposisi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Kawasan Pasifik Selatan*. <https://www.ircorner.com/look-east-policy-upaya-reposisi-kebijakan-luar-negeri-indonesia-terhadap-kawasan-pasifik-selatan/>
- Indonesia, M. of F. A. R. of. (2022). *Indonesia Redoubles its Commitment to Enhance Partnership with the Pacific*.
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/4240/berita/indonesia-redoubles-its-commitment-to-enhance-partnership-with-the-pacific>
- Jayapura, M. (2022). *Suara Pelanggaran HAM Akhirnya Terdengar di Dewan HAM PBB*. 12.
- Kurniawan, H., Rully, R., & Wira, I. M. (2022). *Diplomasi Tni Al Di Kawasan Pasifik Selatan Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Terkait Isu Internasionalisasi Permasalahan Papua*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 728–741.
- Nugroho, A. H. (2019). *Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla Dalam Upaya Membangun Dialog Untuk Penyelesaian Konflik Vertikal Papua Tahun 2014-2019*. *Journal of Politic and Government ...*, 2(1), 1–18.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/24056>
- Rahmadani, S. (2022). **DIPLOMASI INDONESIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2015-2019**. *Jom FISIP*, 9(5), 15.
- Sahanda, D. H. (2020). *Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka*. 36.
- Triwahyuningsih, S. (2018). *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia*. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113.
<https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>
- Zahidi – MA, M. S. (2018). *The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia's interest*. *Przeegląd Politologiczny*, 2, 165–172.
<https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.2.11>
- Zahidi, M. S. (2020). *Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia*. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 65–78.
<https://doi.org/10.33822/mjihi.v3i1.1786>